

**KEBIJAKAN *E-MONEY* DI INDONESIA
PERSPEKTIF *MAQASID AL-SHARI'AH FI AL-AMWAL***

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi ke-Islam-an
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

AHMAD FAUZI
F53416005

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya:

Nama : AHMAD FAUZI

NIM : F53416005

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



AHMAD FAUZI

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi dengan judul “ Kebijakan *E-Money* di Indonesia Perspektif *Maqasid al-Shari’ah fi al-Amwal* ditulis oleh Ahmad Fauzi ini telah disetujui pada tanggal 09 Maret 2020.

Oleh

PROMOTOR I



Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA. (Ketua)

PROMOTOR II



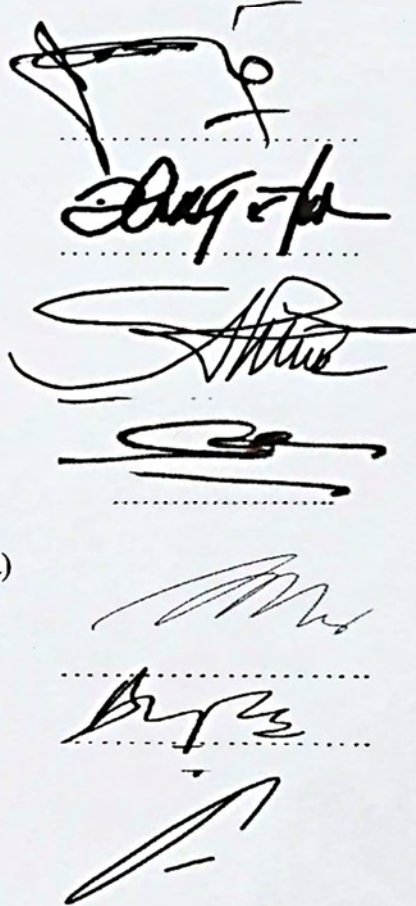
Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA. (Sekretaris)

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi dengan judul “Kebijakan *E-Money* di Indonesia Perspektif *Maqāṣid al-Sharī‘ah fi al-Amwāl*” yang ditulis oleh Ahmad Fauzi telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 02 September 2020.

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Ketua)
2. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I (Sekretaris)
3. Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA (Penguji)
4. Dr. K.H. Ahmad Imam Mawardi, MA. (Penguji)
5. Prof. Dr. K.H. Abd. Mun'im, M.Ag (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM (Penguji)
7. Dr. Sirajul Arifin, M.E.I. (Penguji)



Handwritten signatures of the seven members of the examination team, corresponding to the list on the left. The signatures are written in black ink on a white background.

Surabaya, 02 September 2020
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP:196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **AHMAD FAUZI**
NIM : F53426005
Fakultas/Jurusan : S3-Studi Keislaman
E-mail address : **namasfauzi@yahoo.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kebijakan E-Money di Indonesia Perspektif *Maqāsid al-Shari'ah fi al-Amwāl*

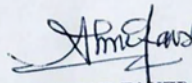
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2020

Penulis


(AHMAD FAUZI)

dalam transaksi, dan sistem yang digunakan adalah prabayar.¹³ Meski demikian, Indonesia masih menggunakan pendapat *Fractional Reserve System* dalam uang beredar, di mana uang diciptakan dari sesuatu yang tidak ada oleh bank komersial. Dikatakan diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, karena pada dasarnya Bank Sentral tidak mencetak tambahan tersebut dalam bentuk uang kartal. Penambahan uang tersebut hanya ada dalam data akuntansi.¹⁴ Walaupun demikian dalam kenyataannya, uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi.¹⁵

Ilustrasi uang beredar yang diciptakan oleh bank, bisa dilihat dengan mudah ketika seseorang mengambil kredit di bank A sejumlah uang 10 juta, dalam jangka waktu 10 tahun dengan bunga 10% pertahun. Maka dalam jangka 10 tahun, uang di bank A bertambah 10 juta sehingga menjadi 20 juta.¹⁶ Ketika uang elektronik ini berbentuk data di bank, maka uang elektronik ini masuk kategori yang mana.

Uraian di atas menunjukkan bahwa uang elektronik dicurigai dari sesuatu yang tidak jelas. Di mana kejelasan merupakan sesuatu yang dituntut

¹³Widyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, I. (2017). "Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ". *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information Systems)*. 1/13 2017, 38-48.

¹⁴Darsono, Ali Sakti dkk, *Masa Depan Keuangan Syari'ah Indonesia* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017), 80.

¹⁵Dalam perkembangannya, penggunaan uang tidak tunai, dalam transaksi ekonomi sudah dikenal secara terbatas pada abad ke-18, pada saat dimulainya evolusi sistem perbankan modern. Sejalan dengan evolusi sistem perbankan tersebut, proses giralisasi, yaitu penyimpanan uang dalam bentuk rekening giro (*demand deposit*) baru dikenal secara luas pada awal pertengahan abad ke-20. Dalam pada itu, masyarakat mempunyai keleluasaan untuk menggunakan baik warkat perintah penarikan maupun cek untuk melakukan transaksi. Perkembangan dan inovasi sistem perbankan yang pesat selanjutnya mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*). Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan "uang elektronik" (*electronic money*), seperti *internet banking*, *debit cards*, dan *automatic teller machine cards*. Evolusi uang tidak berhenti di sini. Uang elektronik juga muncul dalam bentuk *smart cards*., dalam Solikin Suseno, *Uang Pengertian Penciptaan dan Perananya dalam Perekonomian* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002), 7-8.

¹⁶Joseph Pangaribuan, *Delusi Moneter* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), 44.

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan disertasi.

Bab ke dua membahas tentang kajian tentang tentang *tarīkh tashrī‘ fi al-nuqūd* yang digunakan untuk mencari prinsip-prinsip penggunaan uang dari masa ke masa. Kajian ini berfungsi membantu analisis uang elektronik apakah uang elektronik sudah sesuai dengan uang menurut *al-maqāsid al-juz’iyyah*, yang isinya merupakan fiqih uang. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori *maqāsid al-sharī‘ah fi al-amwāl* dan bagaimana penerapan, penggunaan *maqāsid al-sharī‘ah fi al-amwāl* sebagai alat analisis data-data peraturan sistem pembayaran uang elektronik.

Bab ke tiga membicarakan objek data penelitian berupa kebijakan peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018.

Bab ke empat menjelaskan tentang analisis *maqāsid al-sharī‘ah fi al-amwāl* yang terfokus pada *maqāsid al-tharwah al-naqdiyyah* (*maqāsid* nilai uang) terhadap standar sistem pembayaran uang elektronik peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018. Kemudian dilanjutkan bagaimana sistem pembayaran uang elektronik menurut perspektif *maqāsid al-sharī‘ah fi al-amwāl*.

Bab ke lima berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah dibahas, implikasi teori, keterbatasan studi dan rekomendasi.

antara jasa dan barang, menjadi modal pokok dalam harta perserikatan, dan bisa diterima secara menyeluruh oleh penduduk negeri maupun luar negeri.

Uang dinar dan dirham tidak lagi berlaku sebagaimana uang kertas maka uang kertas akan menjadi seperti uang dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak pada zamannya, dalam hukum kekhususannya dan tugas pokoknya secara sempurna. Pendapat ini secara tidak langsung berarti bahwa seluruh hukum yang ada pada uang emas dan perak juga berlaku pada uang kertas, seperti zakat, riba, kewajiban kontan dan sama ketika di akad *ṣarf* dalam jenis sama, dan kewajiban kontan dan tidak diwajibkan sama dalam jenis pada akad jenis-jenis yang berbeda dalam akad *ṣarf*.

Pendapat ini juga berdasar pada kaidah bahwa tidak ada dalil satupun secara spesifik yang meringkas uang hanya ada pada yang dicetak dari emas dan perak. Tidak ada larangan secara *ṣarḥ* akan penggunaan uang selain yang dicetak dari emas dan perak. Seperti penjelasan di atas bahkan teks dari Ibn Taymiyyah mengungkapkan bahwa uang ini tidak bersumber pada syari'ah dan tabiatnya, akan tetapi bersumber pada adat dan istilah atau kesepakatan manusia. Kenyataan sekarang seluruh warga manusia sepakat bahwa uang kertas berfungsi dan bertugas seperti uang, maka wajib memberlakukan hukum uang kertas layaknya uang emas dan perak.

Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalah.⁴⁷ Shaykh Khafīl dalam kitabnya *al-Dhākhīrah* menyebutkan sebuah kaidah yang layak dijadikan dasar juga pada permasalahan ini sebuah kaidah; Setiap hukum yang didasarkan pada suatu '*urf*' (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.⁴⁸

Pada kenyataannya emas dan perak telah hilang dari alat pertukaran di zaman sekarang. Uang kertas telah menggantikan fungsi dari emas dan perak. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah definisi dari uang yang tidak hanya khusus pada emas dan perak sebagaimana para ulama' terdahulu mendefinisikan uang. Sebuah definisi yang berpedoman pada sifat yang terpenting dari uang, adalah sifat dan fungsi uang tersebut. Maka dari itu definisi yang tepat dari uang adalah sesuatu yang dicetak dari emas dan perak, dan apa yang menempati keduanya dalam fungsi ukuran harga segala sesuatu dan sebagai alat pembayaran.⁴⁹

⁴⁷ Aḥmad bin Idrīs bin 'Abd. Raḥmān al-Qarāfi, *Anwār al-Burūq fi Anwa' al-Furūq* (t.t.: 'Alam al-Kutub, t.th.), 2/228.

⁴⁸ Muḥammad bin Yūsuf al-Gharnaṭi, *al-Tāj wa al-Ikhlī li-Mukhtaṣar al-Khāfīl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 7/ 68.

⁴⁹ Hāshīm Maḥmūd, *al-Nuqūd fi Sharī'ah al-Islāmiyyah Isdāruhā wa Tadāwuluha*, 41.

- c. Uang diciptakan dalam rangka keadilan, kesejahteraan bersama.
- d. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang seharusnya ditentukan oleh Negara, terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar, mengharuskan pencetakan uang, pengesahan dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh negara atau institusi resmi yang semisalnya. Sehingga yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.
- e. Riba adalah pertukaran-pertukaran uang yang sejenis yang menyebabkan fungsi uang sebagai alat tukar tidak terjadi, menyebabkan kelangkaan uang sebagai alat tukar.
- f. Penimbunan dan pemalsuan uang, perusakan fungsi uang sangat membahayakan individu maupun masyarakat.

Maqāsid ini berisi enam ciri khas uang menurut hukum Islam, bisa dijadikan indikator hukum munculnya mata uang yang baru. Apakah uang yang baru sudah sesuai dengan indikator ini. Atau untuk penggunaan uang itu sendiri, agar penggunaan uang sesuai dengan *maqāsid*-nya.

Maqāsid al-tharwah al-naqdiyyah merupakan ide dari al-Qarḍāwī, ketika melihat hukum uang sebagai sistem pembayaran yang mempunyai karakteristik sendiri. Qarḍāwī banyak melihat dari apa yang disampaikan al-Ghazālī ketika berbicara hikmah uang sebagai alat tukar. Semua apa yang dikatakan oleh al-Ghazālī yang mempunyai dalil yang kuat bisa dijadikan sebuah *maqṣad* tertentu yang diistilahkan dengan *maqāsid al-tharwah al-naqdiyyah*.

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ⁸¹..

Dari teks-teks tersebut, pemilik harta mempunyai keutamaan-keutamaan, kebaikan, penggunaan, manajemen keuangan dan menghilangkan perilaku menyia-nyiakan harta. Harta nikmat Allah atas hamba-hamba-Nya. Semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia layak untuk dijaga, dianggap penting, layak mendapat penghormatan dan kemuliaan. Ijma' ulama' bahwa menjaga harta adalah termasuk *darūrat khams* yang agung, sebagai pusat dari pemberlakuan dan pengamalan Syari'at

Pelaksanaan penjagaan *maqāsid al-māl* adakalanya dari arah wujud dan adakalanya dari arah meniadakan. Pertama sesuatu yang mestinya dijalankan dalam rangka memelihara wujud keberadaannya. Seluruh sebab yang membuat harta tumbuh berkembang dan perbaikan tata pengelolaannya, seperti menyimpannya menginvestasikannya. Sedangkan penyimpanan yang tidak produktif tanpa dibarengi dengan investasi, atau peniadaan manfaat secara sosial maka hanyalah dianggap sebagai penyia-nyiaan harta Rasul Allah melarang penyai-nyiaan harta.

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ⁸²

Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kalian berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian, mengubur anak perempuan hidup-hidup, menolak kewajiban dan menuntut sesuatu yang bukan menjadi haknya.

⁸¹ al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 13:317.

⁸² al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 8:251:2231.

ketahanan ekonomi yang stabil (ulama' mengadakan batas *farḍu kifāyah* yaitu segala sesuatu bisa dari pengetahuan, keahlian, untuk menegakan kehidupan baik dunia dan akhirat maka wajib hukumnya *farḍu kifāyah* bagi seorang muslim untuk ikut serta pada berbagai macam aspek kehidupan, sehingga seorang muslim tidak tergantung atau melepaskan ketergantungannya kepada umat lain.

Kemerdekaan dan kemandirian yang sejati bagi seorang muslim tidak akan tercapai kalau seorang muslim tersebut tidak bisa melepas ketergantungan pada umat lain, di berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu ulama' mewajibkan *farḍu kifāyah* terhadap keikutsertaan kaum muslimin terhadap berbagai macam sektor ekonomi.

Juga peran *shahādah* sebagai sebaik-baik umat tidak bisa terealisasi kalau tidak mandiri. Misal seorang muslim membeli senjata di negeri kafir yang banyak syarat yang terkadang merugikan seorang muslim.

Agar terjadi kemandirian maka wajib mengikuti langkah berikut

- a) Pentingnya perencanaan
- b) Pentingnya penggunaan komputerisasi yang matang
- c) Pentingnya penyiapan sumber daya masyarakat muslim yang berkualitas
- d) Perbaikan penggunaan sumber pemasukan

penggunaannya terhitung ada kurang lebih 13 bentuk penggunaan *ijtihād maqāṣidi* yang semuanya merupakan cara *ijthād* dalam *uṣūl fiqh* dan *qawā'id fihiyyah* akan tetapi lebih berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah* seperti penggunaan *qiyās*, *masāliḥ al-mursalāh*, *istiḥsān* dan lainnya yang merupakan *istinbāḥ hukm* akan tetapi hasil hukumnya harus berparalel dengan *maqāṣid al-sharī'ah*

Arahan Bin Bayyah dalam penggunaan *maqāṣid* ada empat belas petunjuk sebagai arahan penggunaan *maqāṣid* dalam problematika keuangan kontemporer. Semuanya adalah berkaitan dengan penggunaan *'illah*. Termasuk juga di sini penggunaannya dengan *istinbāḥ* hukum yang berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah*, seperti penggunaan *maṣlaḥah mu'tabarāh* dan *maṣlaḥah mulghāh*, juga *istiḥsān* dan *sad dhari'ah*. Hanya saja, kemungkinan yang bisa digunakan untuk membantu pada disertasi ini hanya petunjuk yang pertama saja yaitu *qiyās 'illah*.

Arahan pertama yaitu mencari bantuan dengan *maqāṣid* untuk menyamakan hukum *far'u* yang tidak ada *naṣ* di dalamnya dengan *al-'aṣl* yang ada *naṣ*-nya, karena adanya satu sifat yang mengumpulkan. Cara ini disebut dengan *qiyās 'illah*.

Masālik al-'illah yang digunakan pada *maqāṣid*, tentunya *masālik 'illah* yang sudah digunakan oleh para ulama' *uṣul* terdahulu. Terkadang *'illah* adalah *maqāṣid* dalam hukum tersebut, karena *'illah* itu juga terkadang sebagai alamat hukum tersebut, terlebih ketika *'illah* tersebut menyebutkan hikmah, di mana hikmah itu adalah termasuk *maqāṣid*.

dalam media elektronik yang merupakan miliknya, di mana nilai uang elektroniknya akan berkurang setiap kali konsumen menggunakannya, untuk melakukan pembayaran. Dibandingkan dengan kartu debit atau kartu kredit, keduanya memerlukan otorisasi secara *online*, dan melibatkan pendebitan rekening bank konsumen setelah transaksi pembayaran. Sebaliknya pengelolaan *e-money* tidak memerlukan otorisasi secara *online*, melainkan secara *offline* yang dilakukan oleh pemegang *e-money*.

Rumusan definisi *e-money* menurut otoritas *Bank for International Settlement* tersebut meliputi baik kartu prabayar kartu (lazim disebut dompet elektronik) maupun produk perangkat lunak prabayar yang menggunakan jaringan komputer (lazim dinamakan dengan *digital cash*). Dalam hal produk berbasis kartu, nilai prabayar biasanya disimpan dalam sebuah *chip mikroprosesor* tertanam dalam kartu plastik, seperti *smartcard*. Pada sisi lain, *network based* produk menggunakan *software* khusus yang di-*instal* pada komputer pribadi untuk menyimpan nilai uang. Pemuatan nilai uang ke perangkat ini mirip dengan penarikan uang tunai dari ATM. Produk ini digunakan untuk transaksi pembayaran dalam rangka pembelian barang dan/atau jasa melalui transfer nilai uang ke perangkat elektronik yang dimiliki *merchant*.

Uang elektronik yang dimaksud adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan

menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.²

Uang elektronik (atau uang digital) adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). *electronic funds transfer* (EFT) adalah sebuah contoh uang elektronik.

Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.³

Secara yuridis pengertian uang elektronik instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit.
- c. Bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

² Veithal Rivai, M.B.A, dkk, *Bank and Financial Institution Managemen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 1367.

³ Firmansyah, dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perseptif Islam* (Lampung: CV. Iqro', 2018), 21.

dalam kartu (bukan *stored value*) melainkan disimpan dalam *server data base* perusahaan telekomunikasi yang menerbitkan kartu pra-bayar tersebut. Dalam hal ini perintah perpindahan dana untuk pembayaran harus dilakukan secara *online* ke *server* penerbit melalui *short messaging services* (sms). Model prabayar ini sebenarnya adalah pengembangan dari bentuk pulsa yang kemudian dikembangkan untuk dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran.

Definisi-definisi di atas, uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran non tunai yang sah di mana nilai uangnya disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan tersimpan melalui suatu media elektronik. Mengingat pada uang elektronik tersimpan sejumlah nilai uang elektronik setelah disetorkan terlebih dahulu kepada bank penerbit, baik secara tunai maupun secara transfer. Bila dicermati konsep uang elektronik dalam Pasal 1 angka 3 PBI No. 11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 18/17/PBI/2016, jelas bahwa produk uang elektronik itu bukan merupakan simpanan, karena nilai uang elektronik yang disetorkan oleh pemegang uang elektronik kepada penerbit uang elektronik tidak tersimpan di rekening bank, nilai uang yang disetorkan tersebut terekam secara elektronik pada kartu yang diterbitkan.

Salah satu sumber pendanaan bank bersumber dari masyarakat yang berasal dari simpanan sebagai produk penghimpunan dana (*funding*). Menurut Undang-Undang Nomor 7/1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3472; untuk selanjutnya disebut UU No. 7/1992) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790; untuk selanjutnya disebut UU No. 10/1998), dana yang bersumber dari masyarakat adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, yang dinamakan dengan simpanan, bentuknya bisa berupa giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998, yang menyatakan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Kegunaan, manfaat dan kelemahan uang elektronik

Seperti sempat disinggung di awal, kehadiran uang elektronik adalah memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan aman. Pandangan ini sekaligus menegaskan bahwa penggunaan uang *cash* menghambat proses transaksi yang membutuhkan kecepatan menyelesaikan transaksi. Faktor inilah yang menjadikan sistem pembayaran dituntut mampu beradaptasi dengan kebutuhan pengguna.

Uang elektronik sebagai bagian sistem pembayaran mikro mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini,

product juga dapat digunakan untuk pembayaran melalui internet dengan menambahkan alat tertentu pada komputer pengguna.

Jenis produk ini menggunakan media kartu dengan teknologi *integrated circuit* (IC) atau dikenal dengan '*IC card*' yang mengandung *microprocessor chip* (*chip*). *IC cards* dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu : *smart cards* dan *memory cards*. *Smart card* telah memiliki fungsi untuk melakukan proses data serta fungsi penyimpanan. Sementara *memory card* hanya memiliki fungsi untuk penyimpanan data.

Saat ini, produk *e-money* yang berbasis kartu pada umumnya menggunakan teknologi *smart card*, mengingat fungsi '*dataprocessing*' sangat dibutuhkan untuk melakukan proses perhitungan. *Smart card* sendiri dapat digolongkan lagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu :

- a) *contact type*, di mana dalam penggunaannya kartu harus dimasukkan ke dalam mesin pembaca (*card-reader*); dan
- b) *contactless type*, di mana dalam penggunaannya kartu tidak harus dimasukkan ke dalam *card-reader*, melainkan cukup diarahkan/didekatkan ke alat pembaca (tanpa harus menyentuh) secara fisik. *Smart card* merupakan kartu plastik di mana sebuah IC *chip* ditanamkan ke dalam kartu tersebut. Di dalam *chip* tersebut terdapat *operating system* dan aplikasi (*software*) yang di-*install* pada saat proses produksi (*manufacturing*) *chip*

dimaksud. *Microprocessor chip* inilah yang berfungsi sebagai pusat pengendalian seluruh transaksi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perhitungan-perhitungan serta perekaman data.

Spesifikasi fisik dan elektronik dari suatu produk *smart card* umumnya mengacu pada *standard* internasional (ISO/EMV). Secara umum, komponen '*chip*' yang ada pada *smart card* adalah sebagai berikut :

- a) *Central Processing Unit* (CPU), yang berfungsi untuk melakukan perhitungan; - *read only memory* (ROM), yang berfungsi untuk menyimpan *operating system* dan aplikasi sistem; - *electronically erasable and programmable ROM* (EEPROM), yang berfungsi untuk menyimpan data variabel seperti saldo *e-money*, data pemegang kartu dan lain-lain;
- b) *Random Access Memory* (RAM), yang berfungsi sebagai '*work area*' pada saat chip melakukan *processing*; dan - *Input/Output* (I/O) yang berfungsi untuk melakukan kontak dengan *external devices*. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh kelompok kerja BIS yang meneliti mengenai perkembangan *e-money* di berbagai negara, produk *e-money* yang saat ini umumnya dikembangkan termasuk ke dalam kelompok *card-based product*. Contoh *card-based product*

termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; dan penerbit yang merupakan lembaga selain bank bagi penerbit lainnya); dan

2) Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari dana *float* ditempatkan pada surat berharga/instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah/Bank Indonesia, atau pada rekening di Bank Indonesia. Persentase penempatan dana *float* wajib disesuaikan dengan jumlah rata-rata bulanan kebutuhan likuiditas untuk memenuhi kewajiban kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

c. Penerbit berupa LSB wajib meningkatkan modal disetor sesuai dengan peningkatan dana *float*. Penghitungan dana *float* dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai dana *float* selama 12 (dua belas) bulan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya. Peningkatan modal disetor dilakukan penerbit paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan.

Dana *float* hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain. Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa, penerbit wajib:

- a. Memiliki sistem dan mekanisme pencatatan dana *float*.
- b. Memiliki sistem dan mekanisme monitoring ketersediaan dana *float*.
- c. Memastikan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu.

disebut sebagai simbol kedaulatan Negara. Undang-undang ini juga banyak menjelaskan mengenai uang yang ada di Indonesia. Landasan lain, juga bisa dilihat pada (PBI) Nomor 17/3/ PBI/2015 ini. Setiap transaksi serta pencantuman harga di wilayah Indonesia harus menggunakan rupiah. Jadi pencatuman harga pada barang yang dijual di Indonesia harus menggunakan rupiah.

Dari semua kajian di atas, dapat dipahami bahwa uang elektronik harus memuat nilai rupiah. Nilai rupiah itulah yang sebenarnya dibuat untuk transaksi pembayaran.

Penyatuan nilai uang ini, selain sebagai kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas nilai uang, juga karena pemerintah menjadikan rupiah sebagai alat bagi negara untuk mengatur dan mengendalikan kondisi ekonomi masyarakat, supaya negara bisa mewujudkan cita-cita menyejahterakan semua masyarakatnya. Persyaratan tentang keharusan nilai rupiah dalam penyelenggaraan sistem pembayaran uang elektronik sekaligus mengeluarkan pembayaran yang bukan dengan nilai rupiah, seperti uang elektronik *bitcoin* dan mata uang berbasis *crypto*, logam emas dan perak ataupun semua yang disebut dengan uang tiak bisa dijadikan alat pembayaran kecuali kalau sudah dirubah menjadi rupiah.

Uang elektronik (*e-money*) juga berbeda dengan alat pembayaran elektronis berbasis kartu lainnya, seperti kartu kredit, dan kartu debit. Kartu kredit dan kartu debit (APMK) bukan merupakan '*prepaid products*' melainkan '*access products*'. Secara umum perbedaan

karakteristik antara '*prepaid product* dan *access product*' adalah sebagai berikut:

Pada *e-money* nilai uang telah tercatat dalam *instrument* uang elektronik (*e-money*), atau sering disebut dengan *stored value*. Sedangkan dalam kartu kredit atau kartu debit tidak ada pencatatan nilai dalam instrumen kartu.

Pada *e-money* dana yang tercatat dalam uang elektronik (*e-money*) sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen. Sedangkan pada kartu debit atau kartu kredit dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.

Pada *e-money* pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari kartu *e-money* milik konsumen kepada terminal *merchant* dapat dilakukan secara *off-line*. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada *level merchant (point of sale)*, tanpa harus *on-line* ke *computer issuer*. Sedangkan pada kartu kredit atau kartu debit pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara *online* ke *computer issuer* untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debit) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah diotorisasi oleh *issuer*, rekening nasabah langsung didebet. Dengan demikian pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit mensyaratkan adanya komunikasi *online* ke komputer *issuer*.

Secara singkat uang elektronik Bank Indonesia adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur-unsur diterbitkan atas dasar nilai uang rupiah yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, yang disimpan secara elektronik, yang dikelola oleh penerbit, yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran. Jadi uang elektronik mempunyai kepentingan sebagai alat bayar.

Indikator pertama pada *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* adalah bahwa uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media alat pertukaran. Indikator ini nampak jelas ketika uang elektronik mengandung nilai rupiah itu sendiri. Kebetulan rupiah telah dijadikan alat tukar terlebih dahulu sebelumnya. Jadi uang elektronik di sini sebagai pengganti fungsi rupiah, bukan sebagai mata uang yang baru. Bahkan dengan fungsinya sebagai alat bayar saja yang sangat *liquid* membuat uang elektronik masuk golongan uang kartal saja. Jadi peraturan ini membuat uang elektronik hanya sebagai alat bayar saja.

Uang elektronik sebagai standar ukuran harga dapat dibuktikan dengan berkurangnya nilai uang elektronik, apabila digunakan untuk transaksi yang kemudian dengan berkurangnya nilai tersebut, standar ukuran harga suatu produk dapat diketahui. Dengan demikian, dengan terdapatnya fungsi-fungsi indikator *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* sebagai alat tukar tersebut dalam uang elektronik.

Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari pada nilai uang yang disetorkan kepada penerbit. Peraturan ini juga menginginkan bahwa

uang elektronik murni pengganti uang rupiah itu sendiri, tidak diperkenankan ada tambahan atau bonus agar tidak menambah jumlah uang yang beredar, sehingga fungsi uang sebagai alat tukar terlaksana nyata.

Dengan tidak menambah nilai uang elektronik berarti tidak menambah tanggungan pada penerbit. Demikian juga dengan tidak mengurangi nilainya, penerbit tidak mengurangi nilai dari uang tersebut, atau tidak mengurangi hak pengguna sedikitpun. Jika ketentuan ini dilanggar oleh penerbit, misalkan dalam rangka persaingan usaha, yang bertujuan ingin memperbanyak nasabah, sehingga memaksa penerbit memberi bonus. Hal ini berakibat adanya pengurangan nilai uang, atau tambahan uang, yang bisa menyebabkan keuangan pada penerbit menjadi tidak sehat, sekaligus melanggar *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah*.

Demikian juga nilai uang yang disetorkan ke dalam uang elektronik harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil. Sehingga memegang uang elektronik dan memegang uang tunai menjadi sama, tidak ada pengurangan nilai, tidak ada yang dikurangi haknya sedikitpun.

Sama dengan fungsi di atas, bahwa uang elektronik tetap menjadi alat tukar murni, ketika adanya larangan bagi penerbit menetapkan minimum nilai uang elektronik sebagai persyaratan penggunaan uang elektronik, atau persyaratan pengakhiran penggunaan uang elektronik (*redeem*). Juga tetap menjadi alat tukar

yang lebih dari itu tentunya dalam rangka menyejahterakan. Uang bagi negara sebagai sebuah mediator, atau alat bagi sebuah negara, dalam mengatur bahkan mengendalikan kondisi perekonomian, supaya negara bisa mewujudkan cita-cita menyejahterakan semua masyarakatnya.

Prinsip dasar lainnya, penyelenggara wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten, menerapkan standar keamanan sistem informasi, memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi uang elektronik secara domestik; dan melakukan interkoneksi dan interoperabilitas, menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

Semua peraturan yang menyebutkan prinsip pelaksanaan uang elektronik selaras dengan indikator dari *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* bahwa penerbitan uang harus dalam rangka menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Maka dalam rangka menjaga indikator ini pelaksana uang elektronik diharuskan menerapkan manajemen risiko, konsisten melakukan pengawasan pada manajemen, pengawasan pada terlaksananya seluruh kebijakan dan kecukupan prosedur dan organisasi, demikian juga pengawasan dan kecukupan pada sumber daya manusia.

Peraturan yang berisi tentang pembatasan uang elektronik, selain fungsinya sebagai minimalisasi kerugian atau potensi terjadinya risiko, juga berfungsi agar uang elektronik tetap berfungsi sebagai alat

Yang membedakan *bitcoin* adalah jurnal elektronik ini tidak disimpan di sebuah instansi atau pihak tertentu. Di *bitcoin*, jurnal elektronik ini disimpan pada masing-masing orang, atau siapapun yang ingin memiliki dan membantu proses transaksi (disebut *maintainers*). Jadi ketika sebuah jurnal digital rusak maka seseorang mempunyai cadangan dari seluruh pengguna lainnya.

Tidak ada satu pihak yang mengontrol jurnal ini, semuanya berpartisipasi. Tapi karena semua orang dapat memiliki jurnal digital ini, maka mereka bisa mengetahui jumlahnya, dan setiap transaksi yang terjadi. Jadi katakanlah hari ini ada seseorang ingin menjadi *maintainers*, maka seseorang tersebut dapat meminta catatan jurnal ke jaringan dan mengunduhnya, kemudian seseorang tersebut dapat melihat isinya. Walaupun demikian seseorang tersebut tidak dapat mencari tahu siapa pemiliknya, karena data yang tersimpan adalah *bitcoin address* (nomor rekening), tanpa nama, alamat atau informasi pribadi lainnya.

Sejatinya, mata uang *bitcoin* diakui oleh penggunannya mempunyai kelebihan dibanding mata uang konvensional:

- 1) *Bitcoin* menggunakan sistem desentralisasi maksudnya tidak ada satu pihak yang mengatur (seperti bank) karena semua orang berpartisipasi dalam prosesnya. Ini berarti tidak ada pihak yang bisa memutuskan satu pihak atau membuat kebijakan baru yang memberatkan pemilik mata uang ini.

- 2) Pembeliannya mudah, tidak seperti bank yang membutuhkan langkah-langkah dan dokumen, seseorang bisa mempunyai *bitcoin* dalam 5 menit saja.
- 3) Kerahasiaan terjaga, Ini mungkin tidak sepenuhnya benar, lagi pula tidak ada sistem yang sempurna. Seseorang dapat membuat *bitcoin address* tanpa menyediakan nama atau alamat. Seseorang dapat membuat rekening tanpa nama atau alamat, dan langsung mendapat nomor rekening yang aktif.
- 4) Walaupun kerahasiaannya terjaga, tetapi tetap transparan, uniknya di saat yang bersamaan, semua orang dapat melihat dan memiliki catatan jurnal. Akan ada informasi *bitcoin address* dan berapa jumlahnya. Tapi tidak akan ada informasi siapa pemilik *bitcoin address* tersebut. Ini contoh transaksi *bitcoin* yang diterima oleh *Wikileaks*.
- 5) Pengiriman *bitcoin* sangat cepat, serta tanpa syarat maupun batasan transfer.
- 6) Biaya transfer *bitcoin* juga sangat-sangat kecil, dan tidak mempunyai biaya-biaya administrasi.

Semua uraian tentang *cryptocurrency* di atas hanya sesuai dengan *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* pada indikator mata uang ini bisa diterima sebagai alat tukar di kalangan tertentu saja. Tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai alat tukar.

Cryptocurrency bisa didapat dengan jual beli, atau bisa didapat dari pembayaran jasa tertentu yang dibayar dengan *bitcoin*. Dengan begitu maka mata uang ini telah dijadikan sebagai komoditas, di mana nilainya

tergantung pasar tidak ada patokan tertentu. Mata uang ini akan naik dan turun nilainya tergantung penggunaannya. Padahal indikator dari *maqāsid al-tharwah al-naqdiyyah* adalah uang bukanlah sebagai komoditas perdagangan uang adalah sebagai media alat tukar saja.

Cryptocurrency juga tidak sesuai dengan *maqāsid* ini karena prinsip menjaga keadilan dan diedarkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat bersama tidak terpenuhi. *Cryptocurrency* ini tidak ada jaminan keadilannya dan sangat rawan digunakan untuk transaksi-transaksi kejahatan, apalagi mempunyai kelebihan hanya sebagai nomor rekening saja, tidak ada nama dan alamat rekening.

Indikator *maqāsid* uang yang diterbitkan dalam rangka kesejahteraan bersama juga tidak nampak pada mata uang elektronik jenis ini, saat ini. Karena mata uang *bitcoin* tidak diketahui diterbitkan oleh siapa dan apa tujuan dari penerbitan ini. Sehingga banyak kecurigaan terhadap uang *bitcoin* sebagai skema *ponzi* yang sangat merugikan pada masyarakat.

Cryptocurrency ini juga tidak sesuai dengan *maqāsid* nilai uang. Karena rawan penimbunan mata uang yang berakibat *cryptocurrency* tidak bisa dijadikan alat tukar karena langkanya alat tukar ini di pasaran.

6. Uang elektronik sebagai sistem pembayaran mengandung beberapa akad

Uang elektronik merupakan sistem pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran

oleh pemegang kepada pedagang. Ada beberapa unsur dalam sistem pembayaran uang elektronik di Indonesia, dan unsur-unsur pada sistem tentunya mempunyai akad-akad tersendiri.

Akad pertama yaitu Pemegang uang elektronik melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu. Penerbit memberikan nilai uang elektronik yang disimpan di media uang elektronik milik pemegang sebesar nilai uang yang disetorkan oleh pemegang. Pada kegiatan pertama ini ada dua akad yang mungkin bisa digunakan oleh pemegang uang elektronik dan penerbit. Adakalanya menggunakan akad jual beli *ṣarf* atau akad *wadī'ah*.

Akad *ṣarf* adalah akad jual beli uang dengan uang. Maka persyaratannya harus sama nilainya, tidak boleh ada kelebihan, atau kekurangan nilai yang mengakibatkan terjadinya riba *faḍl*, atau riba *naṣī'ah* jika terjadi penundaan serah-terima nilai uang yang dikandung di dalam uang elektronik.

Alternatif ke dua dengan akad *wadī'ah*, karena uang yang pemegang ada di penerbit maka penerbit hanya memindahkan simpanan pemegang uang elektronik dari tabungan, atau simpanan ke simpanan uang elektronik yang lebih *liquid*. Dalam akad ini juga tidak diperkenankan adanya tambahan atau pengurangan agar terhindar dari riba *faḍl*.

Alternatif ke tiga dari akad ini adalah akad *qarḍ* akad hutang. Pada akad ini berarti pemegang uang elektronik menghutang pada penerbit sejumlah uang yang digunakan dalam transaksi. Dalam akad ini juga tidak

penyelenggaraan uang elektronik adalah akad *Ṣarf*. Akad tukar-menukar atau jual beli uang.

Akad kedua pemegang uang elektronik melakukan transaksi pembayaran kepada pedagang atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke media/terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan tertentu. Akad antara pemegang uang elektronik dan *merchant* adalah akad jual-beli atau pembayaran jasa, maka akad yang dilakukan antara pemegang kartu dan *merchant* adalah sesuai dengan kebutuhannya, baik jual beli atau jasa.

Akad ketiga terjadi antar pedagang, kemudian dalam periode tertentu melakukan penukaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan nilai uang tunai (*cash*); Penyelenggara kliring melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan pedagang dalam transaksi uang elektronik, setelah hak dan kewajiban masing-masing penerbit dan pedagang dihitung oleh penyelenggara kliring, kemudian penyelenggara penyelesaian akhir bertanggungjawab untuk melakukan penyelesaian akhir (*sattlement*) atas hak hasil perhitungan dari penyelenggara kliring. Pemenuhan hak tagih pedagang kemudian diproses oleh *acquirer* sebagai pihak yang bekerja sama dengan pedagang untuk menampung penerimaan dana, atas nilai uang elektronik yang ditukarkan (*redeem*) oleh pedagang kepada penerbit. Semua akad yang ada di sini adalah akad ijarah, atau akad pembayaran jasa. Bisa saja juga menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah*,

mewajibkan pengguna untuk menyetorkan uang pertama kali, atau melakukan pengisian ulang (*top up*) sebesar nilai tertentu. Jikalau dalam hal nilai uang elektronik tidak mencapai nilai tertentu yang ditetapkan penerbit, pengguna tidak dapat menggunakan uang elektronik tersebut.

Larangan bagi penerbit untuk menetapkan minimum nilai uang elektronik sebagai persyaratan pengakhiran penggunaan uang elektronik (*redeem*). Misalnya penerbit mewajibkan pengguna untuk menyisakan saldo tertentu dari nilai uang elektronik, jika akan melakukan pengakhiran penggunaan uang elektronik.

Penerbit juga dilarang menahan atau memblokir nilai uang elektronik. Misalnya suatu uang elektronik tidak dapat dipergunakan pada saat saldonya telah mencapai nilai tertentu yang ditetapkan oleh penerbit sebagai batas minimal penggunaan uang elektronik. Hal ini dalam rangka ketika penggantian media penyimpan tersebut terdapat kemungkinan masih tersimpan nilai uang elektronik dari pengguna maka pengantiannya tidak boleh menghapus atau menghilangkan nilai uang elektronik yang masih tersisa dan merupakan kewajiban penerbit atau masih merupakan milik pengguna.

Dengan adanya peraturan ini jelaslah bahwa uang elektronik tetap menjadi uang dan nilainya tidak dikurangi, sehingga terhindar dari penyiapan-nyian harta. Peraturan ini juga bisa menghindari dari *riba al-faḍl*. Selain itu, pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak maka tergolong kepada *riba al-nasī'ah*. Sebagai contoh ketika pemegang atau pedagang

melakukan *redeem* nilai uang elektronik kepada nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran.

Uang elektronik terhindar dari *maysir* karena penyelenggaraan uang elektronik didasarkan kebutuhan instrumen pembayaran yang dapat bekerja dengan cepat dan tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan transaksi yang mengandung *maysir*, terhindar dari penipuan seperti uang palsu. Transaksi dalam uang elektronik dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara penerbit dengan pemegang dan pedagang. Selain itu dengan adanya transparansi pengelolaan dana *float* membuktikan bahwa penyelenggaraan uang elektronik telah terhindar dari penipuan, di mana uang elektronik berusaha meniadakan pihak yang dirugikan. Tambahan biaya yang ditentukan hanya untuk biaya-biaya yang jelas akadnya dan sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Semua peraturan tersebut membuat uang elektronik terhindar dari kelebihan yang disebut dengan *riba faql*.

Selain terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syari'at, uang elektronik juga didukung dengan akad yang jelas karena transaksi uang elektronik dilakukan dengan prosedur yang telah sesuai hukum Islam. Maksudnya dilakukan dengan langsung dan tidak mengandung riba seperti pernyataan sebelumnya.

Uang elektronik mendorong orang untuk berhemat dan dapat mengatur belanjanya sesuai kebutuhan dan prioritas kebutuhannya, ini sesuai dengan *maqāṣid istiḥlak amwāl* tidak mubazir dan menyia-

Maksud dari kedua *maqāsid* ini adalah Pencipta menginginkan kepada manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi, maka seharusnya manusia termasuk yang memakmurkannya dengan berbagai jalan dan cara. Termasuk dalam hal ini produksi hal-hal atau peralatan kebutuhan pokok manusia juga yang berkaitan dengan perlakuan manusia pada bumi, pengelolaannya dan menjaga perkembangannya ke arah yang lebih baik. Demikian juga *wajib kifāyah* bagi seorang muslim selalu mengembangkan kualitas semua fasilitas yang berkaitan dengan kehidupan termasuk di dalamnya sistem pembayaran.

Proses terjadinya uang kertas dan menjadi uang elektronik yang aslinya dari dinar dan dirham merupakan proses *sunnat* Allah yang harus memang dilakukan dan terjadi. Manusia sebagai *khalifah* bertugas memakmurkan mengembangkan kualitas kehidupannya, demikian juga perkembangan teknologi yang berdampak pada sistem pembayaran semakin mudah efektif dan lebih efisien.

Maqāsid ini didorong perwujudannya dalam peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik, berupa peraturan kewajiban penyelenggara uang elektronik untuk selalu meningkatkan sistem keamanannya, peningkatan standarisasi personil-personil yang terlibat, pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem yang berlaku umum dan pemeliharaan peningkatan keamanan teknologi mengikuti audit sistem informasi oleh *security auditor independen* secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali atau setiap terdapat perubahan yang signifikan.

Qardāwi mempunyai istilah tersendiri berkaitan dengan *maqāṣid* ini yaitu: *maqāṣid qīmat al-māl*. Beliau juga membaginya menjadi lima. (*bayān manzilat al-māl, ijāb al-muḥāfazahā, al-taḥdhīr min al-iftinān wa al-tughyān bih, rabṭ al-māl wa al-iqtisād bi al-īmān wa al-akhlāq*). Fungsi dari *maqāṣid* ini agar manusia sadar bahwa harta diberikan kepadanya sebagai modal untuk menjalani kehidupan, dan sebagai amanat yang diberikan kepada manusia dalam rangka menjadi *khalīfah* Allah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Makna dari manusia menjadi *khalīfah* di dalam hartanya yaitu bahwasanya manusia menjadi wakil dari Pemilik harta tersebut, sebagai pengganti dari pemilik, diberi amanat, seperti bendahara dalam sebuah organisasi, dia tidak berhak menggunakan sekehendak hatinya. Bahkan penggunaannya harus diikat dengan perintah-perintah, dan arahan-arahan pemilik harta tersebut.

Pemilik harta pada hakikatnya adalah yang menyuruh pemilik harta yang menggunakan namanya bahwa dia mengeluarkan hak-hak kewajibannya pada pemiliknya yang pertama zakat wajib, bahkan dianggap beribadah mengeluarkannya, demikian juga diperintah mengeluarkan hak-hak yang lainnya seperti menyantuni keluarga. Allah juga memerintah pada manusia untuk memperlakukan harta dengan yang halal dan mengembangkan dengan jalan yang benar, dan tidak *bakhīl* atau menahan hartanya ketika harus dikeluarkan, dan tidak membelanjakannya di jalan yang membuat kemarahan pemilik harta, seperti minuman keras dan judi, dan menggunakan hartanya dengan adil, dan tidak melampui

Semua peraturan ini jelas mementingkan etika sumber daya manusia, mementingkan perilaku yang baik, pentingnya mempunyai komitmen untuk keadilan dan kehati-hatian. Semua peraturan ini, kalau dilaksanakan dan diniatkan dalam rangka menghubungkan antara kegiatan keuangan dan Pencipta-nya, maka secara tidak langsung penyelenggara melaksanakan kegiatan *khalifah Allah*, kegiatan pemakmuran, kegiatan ibadah yang semuanya adalah tujuan terciptanya harta oleh al-*Shāri'*.

Semua peraturan tentang personil penyelenggara diharapkan sebagai penguatan kelembagaan sistem pembayaran, yang berfungsi agar tidak ada kebocoran dan konflik dikemudian hari, yang kalau terjadi akan banyak harta yang tersia-sia. Pengetatan terhadap kelembagaan sekaligus sebagai seleksi lembaga yang kredibel dan berkualitas sehingga industri uang elektronik akan semakin berkembang dengan baik dan kuat serta terciptanya persaingan usaha yang sehat. Uraian ini yang diinginkan oleh *Shāri'* kepada manusia sebagai *khalifah* dan yang memakmurkan bumi di muka bumi.

3. *Maqāṣid al-khaṣṣah bi al-amwāl* membaca manfaat sistem pembayaran uang elektronik

Penggunaan uang elektronik menjadikan transaksi lebih cepat, efisien waktu tanpa harus menginput PIN dan tanda tangan bila transaksi dilakukan dengan cara *off-line*. Pemegang uang elektronik tidak perlu bersusah payah untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tidak perlu menyediakan uang pas untuk suatu transaksi tertentu, dan

Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah mempunyai istilah tersendiri dalam membagi-bagi *maqāṣid al-darūriyyāt* menjadi empat ruang lingkup. Hal ini berdasar pada *uṣūl al-Islām* yang berpandangan harta benda pada hakikatnya adalah milik Allah, namun manusia diberikan amanah atas harta benda, maksudnya yang dituntut sebenarnya adalah membangun (kemaslahatan) di muka bumi. Ini berarti kepemilikan adalah *wazīfah ijtimā’iyyah* tanggung jawab sosial, bukan hak secara mutlak. Maka pekerjaan yang diwajibkan bukanlah untuk sekedar mencari penghasilan saja, namun bertujuan membangun (kemaslahatan) di muka bumi.

Pemeliharaan harta dalam ranah individu dengan istilah *ḥifẓ al-māl*. Artinya setiap individu harus menjaga hartanya dan menjadikan hartanya sebagai amanat maka harus menggunakannya ke ranah yang bermanfaat dan produktif bagi kelestarian kebaikan setiap individu-individu. Pemeliharaan harta dalam lingkup keluarga diistilahkan dengan *tanẓīm al-jānib al-māliyy li al-’usrah*. Artinya keluarga harus mengatur seluruh penghasilan dan pengeluarannya serta menggunakan harta keluarga ke hal-hal kebutuhan pokok dan hal-hal yang produktif, dan menghindari pembelanjaan yang tidak ada manfaat dan maslahatnya, baik pada keluarga maupun pada perkembangan harta tersebut. Pemeliharaan harta dalam lingkup masyarakat dan umat, dengan istilah *ḥifẓ al-Amn*, (memelihara stabilitas keamanan), dan *maqṣad al-tanẓīm al-mu’assasiyy li al-ummah* (pengaturan keorganisasian bagi umat), dan *maqṣad imārah al-arḍ wa ḥifẓ tharwat al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kekayaan umat).

Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas sistem pembayaran selain sesuai dengan *hifz al-māl* lingkup individu, juga sesuai dengan *maqṣad al-tanzīm al-mu'assasiy li al-ummah*. *hifz al-māl* dalam lingkup individu mewajibkan seseorang benar, dan tepat menggunakan uangnya, dan kebetulan itu sudah ada fasilitasnya, tidak menggunakannya dalam kejahatan, karena semua transaksi uang elektronik akan tercatat dan terlacak dengan mudah. Demikian juga Bank Indonesia mendukung uang elektronik dengan menentukan batasan-batasan transaksinya setiap harinya. Keterbatasan itu sebagai aplikasi dari *maqṣad tanzīm al-jānib al-māliyy li al-'usrah* (pengaturan keuangan keluarga).

Otoritas BI sebagai pengendali dan pengawas sistem pembayaran nasional merupakan praktek dari *maqṣad ḥifz al-Amn*, (memelihara stabilitas keamanan) sekaligus juga sesuai dengan *maqṣad al-tanzīm al-mu'assasiy li al-ummah* (pengaturan keorganisasian bagi umat). demikian juga *maqṣad imārah al-ard wa ḥifz tharwat al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat). *Maqāṣid* tersebut merupakan terjemahan dari *ḥifz al-māl* yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-'āmmah*.

Ibn 'Ashūr punya bahasan sendiri dalam *maqāṣid ḥifz al-māl*, dalam hal ini, beliau menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *maqṣad* ini adalah menjaga harta umat seluruhnya, karena lahan menjaga harta untuk setiap individu adalah termasuk *maqāṣid al-darūriyat* yang merupakan sebuah kewajiban individu, dan teledor terhadap harta adalah suatu dosa.

Demikian juga berarti menjaga harta umat lebih wajib, dan lebih darurat dan lebih wajib, menyalakan harta umat juga lebih berdosa.

Uraian Ibn 'Ashūr tersebut diambil dari sebuah pemahaman dari sebuah hadis yang mengatakan bahwa seseorang yang mati dalam rangka mempertahankan hartanya, maka matinya dihukumi mati syahid. Kalau saja seseorang yang mati demi membela atau mempertahankan hartanya dihukumi mati syahid, maka demikian juga semestinya, kalau seseorang membela atau menjaga hartanya masyarakat. Semestinya menjaga hartanya masyarakat dihukumi mati syahid. Kalau mati dihukumi syahid itu berarti memperjuangkan hartanya masyarakat, mengembangkannya dengan cara apapun yang efektif dan efisien dan menggunakannya ke ranah yang lebih bermanfaat, adalah sebuah perjuangan yang mulia sebagaimana matinya semulia-mulia kematian (syahid) maka kehidupannya semestinya juga mulia.

Dari uraian Ibn 'Ashūr tersebut bahwa termasuk wajib bagi setiap individu untuk ikut serta menjaga nilai mata uang dengan menggunakan dan memanfaatkan kepada hal-hal yang ada manfaatnya atau mengembangkannya dengan menginvestasikan ke ranah yang lebih produktif. Demikian juga wajib bagi pemerintah atau negara termasuk personil yang ada di dalamnya untuk membuat undang-undang yang mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Keberadaan Bank Indonesia sebagai pelaksana dalam hal ini menjadi posisi yang penting dan tentunya wajib ada keberadaannya dan didukung setiap kebijakannya.

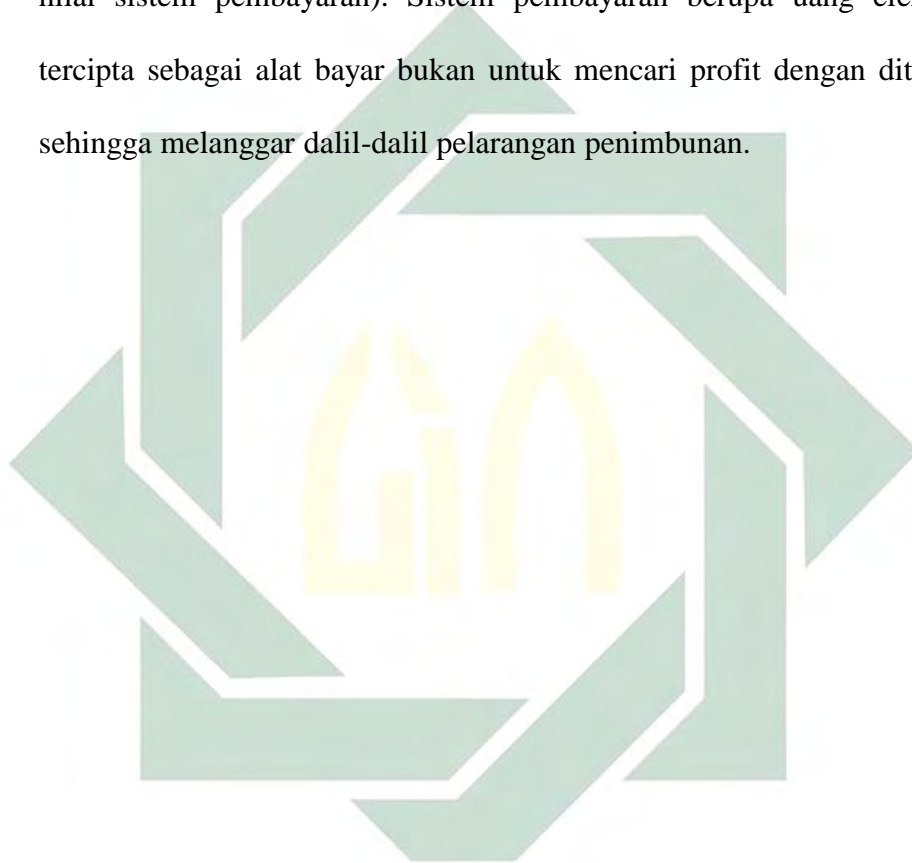
tiba-tiba bergerak jatuh. Pasalnya nilai tukar mata uang ini sangat fluktuatif, sehingga berpotensi besar merugikan konsumen.

Mata uang *bitcoin* bertentangan dengan beberapa undang-undang yang berlaku dalam dunia perbankan, yaitu undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang dan undang-undang no. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang mata uang dinyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang disebut rupiah, dan dalam undang-undang Bank Indonesia dinyatakan mata uang yang sah beredar di Negara Republik Indonesia adalah uang rupiah.

Semua *maqāsid* yang tersebut di atas baik *maqāsid al-sharī‘ah al-‘āmmah*, *maqāsid al-khaṣah bi al-mu‘amalāt* dan *maqāsid al-juz‘iyyah* tentang sistem pembayaran mendukung uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Peran BI sebagai penanggung jawab terhadap sistem pembayaran dianggap sangat penting. Kesesuaian *maqāsid* tersebut banyak disebabkan karena peran BI yang dominan dalam menjaga kestabilan nilai pada uang elektronik. Kalau peran BI dihilangkan seperti pada penggunaan mata uang *bitcoin*, maka tidak ada kesesuaian pada *maqāsid ḥifz al-māl*, walaupun mempunyai fungsi dan keistimewaan seperti uang elektronik yang lain. Karena hilangnya fungsi penjagaan stabilitas harga mata uang di saat ini, membuat mata uang ini sulit diterima kesesuaiannya dengan *maqāsid ḥifz al-māl*.

Kemungkinan *bitcoin* diperbolehkan dengan dalil *istiṣḥāb* yaitu *al-aṣlu fi al-mu‘amalāt al-ibāḥah* pada dasarnya segala sesuatu dalam

Penimbunan emas dilarang karena emas dahulu dijadikan sebagai unsur pembuatan alat tukar dinar, demikian juga larangan pemakaian peralatan rumah tangga dari emas. Semua fungsinya dalam rangka menjaga keberadaan emas sebagai alat tukar bukan investasi. Jadi investasi dengan alat tukar tidak sesuai dengan *maqāṣid al-tharwah al-naqdiyyah* (*maqāṣid* nilai sistem pembayaran). Sistem pembayaran berupa uang elektronik tercipta sebagai alat bayar bukan untuk mencari profit dengan ditimbun, sehingga melanggar dalil-dalil pelarangan penimbunan.



mendorong semangat semua *maqāṣid al-Shāri‘ fi al-māl* (tujuan Pencipta terhadap harta), berupa *maqṣad al-istikhlaf*, *maqṣad al-‘imārah*, *maqṣad al-‘ibādah*, *maqṣad al-tazkiyyah*, *maqṣad al-‘adl*, serta berkesesuaian dengan *maqāṣid* yang khusus pada transaksi harta, (kelancaran transaksi, keadilan, pemeliharaan, kejelasan, berketetapan), serta *maqāṣid ḥifẓ al-māl*. Pelarangan *virtual currency* merupakan praktek *ḥifẓ al-māl min nāḥiyah al-‘adam*, maksudnya menjaga harta dari penyia-nyiaan, kecerobohan, atau kehilangan.

B. Implikasi Teoritik

Bentuk *maqāṣid* yang ada pada disertasi ini merupakan derivasi dari *maqāṣid ḥifẓ al-māl*. *Maqāṣid* tersebut dijadikan indikator penilaian terhadap aspek kesyarifan produk kebijakan perekonomian Peraturan Bank Indonesia PBI No. 20/6/2018.

Ḥifẓ al-māl merupakan bagian dari *maqāṣid shari‘ah al-‘āmmah*, atau merupakan *al-darūriyyah al-‘āmmah*. Artinya *ḥifẓ al-māl* harus selalu ada dan tidak mungkin ditiadakan dalam kehidupan manusia. Karena semua aktifitas kehidupan manusia sangat tergantung dari *maqāṣid* ini. Semua *maqāṣid al-‘āmmah* baik *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql* dan *ḥifẓ al-nasl*, tidak akan bisa berjalan secara optimal tanpa memperhatikan *ḥifẓ al-māl*.

Maqāṣid yang dikeluarkan dari *ḥifẓ al-māl* bisa menjadi lebih tinggi derajatnya kalau menyangkut kebutuhan hidup manusia, seperti bila sudah berkaitan dengan keutuhan negara, stabilitas keamanan, stabilitas perekonomian,

cryptocurrency. Karena uang elektronik *cryptocurrency* sangat bertentangan dengan *maqāṣid al-‘āmmah ḥifz al-māl*. Walaupun demikian, jika kita melihat fakta sejarah perjalanan mata uang, dari dinar dan dirham menjadi uang fiat (tidak ada nilai emasnya) yang dahulunya juga ditolak pada awal-awalnya, tetapi dengan berjalannya waktu uang fiat juga beredar dan disahkan ketika maslahatnya dilihat lebih besar dan bisa menghindarkan dari bahaya-bahaya yang dikhawatirkan sebelumnya. Maka kemungkinan uang elektronik *cryptocurrency* bisa berganti hukumnya menjadi boleh.

Perkembangan teknologi yang pesat pada sistem pembayaran berdampak positif bagi kebaikan dan kemaslahatan untuk manusia. Tentunya juga perkembangan teknologi berdampak negatif. Oleh karena pentingnya diadakan penelitian, kajian yang terus menerus selain itu bagi pemerintah juga memperpaharui standarisasi sistem pembayaran, demikian juga peningkatan sumber daya manusia, manajemen, peraturan-peraturannya, demi terjaganya kemasalahatan bersama. Sekaligus sebagai lahan akademik untuk penelitian terhadap kajian hukum ekonomi syari'ah.

- Barūt, Muḥammad Jamāl dan Aḥmad al-Raysūni. *al-Ijtihād: al-Naş, al-Wāqi', al-Maslahah*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āşir, 2000.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bin Bayyah, 'Abd Allah. *al-Mu'āmalāt wa al-Maqāşid*. Bahth Muqaddam, fi Dawrah al-Thāminah 'Ashar, Majlis Ifta' wa al-Buhūth, 2008.
- Maqāşid al-Mu'āmalāt wa Murāşidat al-Wāqi'āt*. Dubai: Markaz al-Muwaṭa', 2018.
- Būti (al), Sa'id Ramaḍān al-Būti. *Ḍawābiṭ al-Maşlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Mu'assasāt al-Risālah wa al-Dār al-Muttaḥidah, 2000.
- Budi Hartono. <https://finance.detik.com/moneter/d-2775698/urusan-transaksi-non-tunai-indonesia-masih-kalah-dari-negara-afrika-Bukittinggi>, Sumatera Barat, Jumat (12/12/2014) diakses 24 Februari 2018.
- Bukhāri (al), Muḥammad bin Ismā'il al-Ju'fi. *Şahīḥ al-Bukhāri*. Damaskus: Dār al-Tawq al-Najāh, 1422H.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Choudhury. *Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy*. London: The Macmillan Press Ltd, 1996.
- Dardīr (al), Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Dardīr. *Al-Sharḥ al-Kabīr bi Ḥaşiyah al-Dāsūqi*. Kairo: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, T.th.
- Darsono, Ali Sakti dkk. *Masa Depan Keuangan Syari'ah Indonesia*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2017.
- Dāsūqi (al), Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah al-Dāsūqi. *Ḥaşiyah al-Dāsūqi*. Kairo: Maktabah Tijariyyah al-Kubra, t.th.
- Djazuli, A. Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Fāsi (al), 'Alāl. *Maqāşid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha*. Rabat: Maktabah al-Wiḥdah al-'Arābiyyah, t.th.

- Frederich S. Miskhin. *The Economic of Money, Banking, and Financial Market, 8.* diterjemahkan Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan Buku 1. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Gharnaṭi, (al). Muḥammad bin Yūsuf. *al-Tāj wa al-Iklīl li-Mukhtaṣar al-Khalīl.* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Ghazālī (al), Abu Ḥāmid Muḥammad. *al-Mustaṣfa min ‘Ilm al-Uṣūl.* Lebanon: Dār al-Huda, 1994.
- , *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn.* Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.th.
- Gilpin, Robert. *The Political Economy of International Relations.* Princeton: Princeton University Press, 1987.
- Glyn Davies. *A History of Money from Ancient Times to the Present Day.* Cardiff: University of Wales Press, 3rd ed 2002.
- Ḥisān, Ḥusain Ḥāmid. *Naẓariyāt al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islāmi.* Beirut: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Ḥasan, Aḥmad. *al-Awrāq al-Naqdiyyah Fi al-Iqtisād al-‘Islāmi Qīmatuha wa ‘Aḥkāmaha.* Damaskus: Dār al Fikr, 2007.
- Hidayati, Siti dkk, *Operasional E-money,* Jakarta: BI, 2006.
- [https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/05/070000526/bank-sentral-inggris--bitcoin-dkk-gagal-sebagai-mata-uang.](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/05/070000526/bank-sentral-inggris--bitcoin-dkk-gagal-sebagai-mata-uang)
- <https://kbbi.web.id/>
- [https://www.truemoney.com.id/faq.php.](https://www.truemoney.com.id/faq.php)
- Ḥusayni, Ahmad. *Bahjat al-Mushtāq Fi Ḥukm Zakāt al-Awrāq al-Naqdiyyah.* Kurdistan: Kurdistan ‘Ilmiyyah, 1911.
- Ibn ‘Ashūr, Muḥammad Ṭāhir. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah,* Kairo: Dār al-Salām, 2007.
- Ibn Fāris, *Mu‘jam Maqāyis al-Lughah Taḥqīq ‘Abd al-Salām Harūn.* Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Ibn Ḥammām, Kamāl al-Dīn. *Fath al-Qadīr Sharḥ al-Hidāyah.* Kairo: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, t.th.

- Ibn Ḥanbal, Aḥmad al-Shaybāni. *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Mu'asasah al-Risālah, 2001.
- Ibn Ḥibban, Muḥammad. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1988.
- Ibn Khaldun, 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Khaldun. *Muqadimah Ibn Khaldun*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabi, 2001.
- Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazid al-Quzwayni. *Sunan Ibn Mājah*. T.t: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyya,t.th.
- Ibn Manzūr, Muḥammad, *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣadir, 1990.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad bin Abi Bakr. *I'lām al-Muwāqī'in*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Ibn Qudāmah, Muwafiq al-Dīn bin 'Abd Allah bin Qudāmah. *al-Mughny Sharḥ Mukhtaṣar al-Kharqi*. Lebanon: Dār al-Kitab al-'Araby, 1968.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Aḥmad 'Abd al-Salām. *Majmū' al-Fatāwā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Ibn Zaghbihah, 'Izzu al-Dīn. *al-Maqāṣid al-'Ammah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Ṣafwah, 1996.
- Ibn Badrān. *al-'Uqūd al-Yāqūtiyyah fi Jādli As'ilah al-Kuwaytiyyah li Ibn Badrān*. Kairo: Maktabah al-Sidāwī, 1992.
- Ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār Ihyā' Turāth al-'Arabi, t.th..
- Isharyanto. *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016.
- Isnawi (al), 'Abd al-Raḥīm bin al-Ḥasan. *Nihāyat al-Sūl Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,1999.
- Jafar, Syamsudin. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: Kota Kembang Yogyakarta, 1993.
- Jaṣāṣ (al), Aḥmad bin 'Ali Abu Bakar. *al-Fuṣūl Fi al-'Uṣūl*. Kuwait: Wizarah al-'Awqāf al-Kuwaytiyyah, 1994.

- Jizāni (al), Muḥammad bin Ḥusayn. *Tahdhīb al-Muwāfaqāt li al-'Imām al-Shāṭibi*. Riyād: Dār Ibn Jawzi, 1421.H.
- John M. Echols dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.S
- John Ravenhill, *Global Political Economy*, New York: Oxford University Press, 2005.
- Julius R. Latumaerissa. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Selemba Empat, 2011.
- Jurjani (al), 'Ali Ibn Muḥammad. *al-Ta'rifāt*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1405.
- Kāsāni (al), 'Alā' al-Dīn Abi Bakr bin Mas'ūd. *Badā'i' al-Sanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Kafrāwi (al), 'Awf Maḥmūd. *al Nuqūd wa al-Maşārif fi al-Niẓām al-Islāmi*. T.t : Dār al-Jāmi'ah al Mişriyyah, 1407.
- Kaylāni (al), 'Abd al-Raḥmān Ibrāhīm. *Qawā'id al-Maqāşid 'inda al-Imām al-Shāṭibi 'Araḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan*. Damaskus: Dār al-Fikr 2000.
- Karamili (al), Anastās. *al-Nuqūd al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah wa 'Ilm al-Namyāt*. Kairo: Maktabah al-'Aşriyyah, 1987.
- Karim, Adiwarmān Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kennedy, Paul. *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*, London: Unwin Hyman, 1988.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khallāq (al), Ḥasan. *Ta'rif al-Nuqūd wa al-Dawāwin*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Mişri, 1986.
- Kuncoro, Haryo. <https://kolom.tempo.co/read/1070950/menju-uang-digital-rupiah/full&view=ok>. 21 januari 2020.
- Laurence Copeland. *Exchange Rates and International Finance, fourth edition*. New York: Prentice Hall, 2005.

- Lee, Stephen J. *Aspects of European history, 1789-1980*. London: Routledge, 1987.
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Louis Ma'lūf, *al-Munjīd fī al-Lughat wa al-Adāb wa al-'Ulūm*. Beirut: al-Maṭba'ah al-Kathulikiyyah, t.th.
- Lubis, M. Solly. *Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007.
- Maḥmūd, Muḥammad Hāshīm. *al-Nuqūd fī Sharī'ah al-Islāmiyyah Iṣḍāruhā wa Tadāwuluha*. Kairo: Dār Ikhsān, 2019.
- Majid, Abdul. Mahmood Zuhdi. *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*. Kuala Lumpur: Jabatan Penerbitan University Malaya, 1992.
- Mālik bin Anās bin Ma'lik. *al-Mudawwanah Kitāb al-Ṣarf*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Manī', 'Abd Allah bin Sulaymān. *al-Waraq al-Naqdi*. Riyāḍ: Maṭābi' al-Faruzdaq al-Tijāriyyah, 1984.
- Maqrizi (al), Taqiy al-Dīn, Aḥmad bin 'Ali. *Shudhūr al-'Uqūd fī Dhikri al-Nuqūd*. Beirut: Dār al-Zahra', 1988.
- , *al-Nuqūd al-Islāmiyyah*. Manshūrat al-Maktabah al-Ḥaydariyyah, V, 1967.
- Markwell, Donald. John Maynard Keynes and International Relations: *Economic Paths to War and Peace*, Oxford & New York: Oxford University Press, 2006.
- Masri Singarimbun dkk., *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S, 1982.
- Masyhuri dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung:RefikaAditama. 2008.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjejep Rohadi*, Jakarta: UIP, 1992.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqih Minoritas*. Yogyakarta: PT.LKIS Printing, Cemerlang, I, 2010.

- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moch. Khoirul Anwar. “Ekonomi dalam Perspektif Islam” *ISLAMICA*, Vol. 3, No. 1, September 2008.
- Mohtar Mas’oed, *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Muaḥammad bin ‘Isa bin Sawrah, al-Tirmīdhī., *Sunan al-Tirmīdhī*. Mesir: Sharīkah Maṭba‘ah Muṣṭafa, 1975.
- Muallim, Amir dan YUSDANI. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mujibatun, Siti. *Konsep Uang Dalam Hadis*. Disertasi--IAIN Walisongo. Semarang: Penerbit Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012.
- Muklis dan Didi Suardi. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Munawwir, Adib Bisri, dan A. Fatah. *Kamus al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Muṣṭafa, Namr Aḥmad al-Sayyid. *Uṣūl al-Nazar fī Maqāṣid al-Tashrī’ al-Islāmi wa Bayān ‘Alāqah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah Biha*. Beirut: Dār al-Nawādir, 2013.
- Najjār (al), ‘Abd al-Majīd. *Maqāṣid al-Sharī‘ah bi Ab‘ād Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2006.
- Nasā’i (al), Aḥmad bin Shu‘ayb al-Ḥurashani al-Nasā’i. *Sunan al-Nasā’i*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Naysabūri (al), Muslim bin Ḥijjaj al-Naysabūri. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār ihyā’ al-Turāth al-‘Arabi,t.th.
- Penjelasan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Unisba, 1995.
- Pangaribuan Joseph. *Delusi Moneter*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.
- Pratama Raharja dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Prestowitz, Clyde. *Rogue Nation: American Unilateralism and the Failure of Good Intentions*, New York: Basic Books, first edition, 2003.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Qal'ah Ji, Muḥammad Rawwās. *al Mu'āmalāt al-Māliyyah al Mu'āṣirah fi Ḍaw' al Fiqh wa- Sharī'ah*. Bairut: Dār al Nafā'is, 1999.
- Qarāfi (al), Aḥmad bin Idris. *Anwār al-Burūq fi Anwā' al-Furūq*. T.t.: 'Alam al-Kutub, t.th.
- Qardawi (al), Yusuf. *Ijtihad dalam Syariat Islam*. Terj. Aḥmad syathori. Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Terj. Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- *Maqāṣid al-Sharī'ah fi al-Muta'aliqah bi al-Māl*. Bahth Muqaddam li Dawrah al-Thāminah 'Asharah li-al-Majlis Dablin Yuliy, 2008.
- Qaṭṭan (al), Manna'. *al-Tashrī' wa al-Fiqh al-Islāmi*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, t.th.
- Raysūni (al), Ahmad. *al-Dharī'ah ilā Maqāṣid al-Sharī'ah*. Kairo: Dār al-Kalimah li al-Nashr wa al-Tawzī', 2016.
- *Imam al-Shātibi's Theory of The Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, xxi.
- *Muḥāḍarah fi al-Maqāṣid al-Sharī'ah*. Kairo: Dār al-Kalīma, 2014.
- *Nazariyyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Shātibi*. Riyad: Dār al-'Alāmiyyah li al-Kitāb al-Islāmi, IV, 1995.

- *al-Fikr al-Maqāṣidi*. Rabat: Maṭba‘ah al-Najāh al-Jadīdah, Dār al-Bayḍā’ 2000.
- Ramli (al), Muḥammad bin Aḥmad Shihab al-Dīn al-Ramli. *Nihāyah al-Muḥtāj ila Sharḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikri, 1974.
- Rivai, Veithzal dkk. *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ronald I. McKinnon. “The Rules of the Game: International Money in Historical Perspective”, *Journal of Economic Literature*, Vol. 31, Issue 1, March 1993.
- Sa‘adi (al), ‘Abd al-Ḥakīm bin ‘Abd al-Raḥīm. *Mabāḥith al-‘illat fi al-Qiyās ‘inda al-Uṣūliyyīn*. Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah, 2000.
- Sa‘di (al), ‘Abd al-Raḥmān Nāṣir. *al-Fatāwā al-Sa‘diyyah*. Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1995.
- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.
- Samsumar, L. D. (2016). Konsep dan Tantangan Penggunaan Teknologi *E-money* Sebagai Alat Pembayaran Alternatif di Indonesia. *Jurnal Methodika*, Vol. 2 No. 1 Maret 2016, 102-107.
- Sarkhūsi (al), Muḥammad bin Aḥmad. *al-Mabsūṭ*. Beirut; Dār al-Ma‘rifah, 1993.
- Shāfi‘i (al), Muḥammad bin Idrīs. *al-Um*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1990.
- Shāṭibi (al), Abu Ishāq, Ibrāhīm bin Mūsa. *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Shaikh (al), Ghassan Muḥammad. <http://sharjah.ac.ae/ar/Media/Conference/Vce2019>.
- Shinqīti (al), Muḥammad Amīn bin Mukhtar. *Aḍwā’ al-Bayān*. Beirut: Dār al-Ḥadīth, 2006.
- Shubayr, Muḥammad ‘Uthmān. *al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āṣirah*. ‘Amān: Dār al-Nafā’is, 2001.

- Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, III, 2012.
- Solikin, Suseno. *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2002.
- Sri Mulyati, Tri Subari, Ascarya. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003.
- Stern, Ernest H. "The Agreements of Bretton Woods" Blackwell Publishing , The London School of Economics and Political Science, The Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines, *Economica*, New Series, Vol. 11, No. 44, (November 1944), 165.
- Subki (al), Tāj al-Dīn. *Ḥāshiyah al-‘Allāmah al-Bannāni ‘ala Matn Jam‘ al-Jawāmi‘* Mesir: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Suparmono, Gatot. *Hukum Uang Di Indonesia*. Bekasi; Gramata Publishing, 2014.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syahputra, Rizki. "Dinar Uang Masa Depan", *Jurnal Ecobisma* Vol 2 No. 1 Jan 2015.
- Ṭabari (al), Ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

- Ṭabrāni (al), Sulaymān bin Aḥmad bin Ayyub. *al-Muʿjam al-Kabīr li al-Ṭabrāni*. Riyad: Dār al-Ṣumayʿī, 1994.
- Tim Inisiatif 2006 Bank Indonesia, Working Paper: *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-money*. Jakarta: BI, 2006.
- Tirmīdhi (al), Muḥammad bin ʿIsa al-Ṭirmidhi. *Sunan al-Ṭirmidhi*. Mesir: Sharīkah Maktabah wa Maṭbaʿah, 1975.
- Undang Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
- Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-undang No.7 Tahun 2011, <http://www.bi.go.id>.
- Wahyuni dkk, Erma. *Kebijakan dan Manajemen Privatisasi BUMN/BUMD*. Yogtakarta: YPAP, 2003.
- Walter, Andrew. *World Power and World Money: The Role of Hegemony and International Monetary Order*. London: Harvester Wheatsheaf, 1991.
- Warson, Ahmad. *Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Widyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, I. (2017). “Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ” *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information Systems)*. 1/13, 2017.
- Yūbi (al), Muḥammad Saʿīd. *Maqāṣid al-Sharīʿah wa ʿAlāqatuhā bi al-ʿAdillah al-Sharʿiyyah*. Riyad: Dār-al-Hijrah, 1998.
- Zaʿtari, ʿAlāʾu al-dīn Maḥmūd. *al-Nuqūd Wazāʿifiha al-Asāsiyyah wa Aḥkāmuhā al-Sharʿiyyah*. Damaskus: Dār Qutaybah, 1996.
- Zāwi (al), al-Ṭāhir Aḥmad. *Tartīb al-Qāmus al-Muḥīt, ʿala Ṭarīqah al-Misbāḥ al-Munīr wa Asās al-Balāghah*. Beirut: Dār al-Fikri, III, tt.
- Zidahu,Tali. *Research Teori, Metodologi, Administrasi*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.